



Bangli Bocor

29 Persen Pipa PDAM

Pipa Uzur, Sudah Lebih 30 Tahun

BANGLI - PDAM Bangli tampaknya tidak pernah lepas dari belitan masalah. Selaian hutang miliaran rupiah belum bisa dibayar, pemberian kompensasi bagi pemilik tanah yang digunakan untuk membangun bak penampungan juga belum beres. Terbaru, perusahaan daerah tersebut juga sedang berkuat menga-

tasi kebocoran pipa jaringannya.

Saat ini kebocoran pipa jaringan PDAM Bangli mencapai 29 persen. Padahal sesuai standar nasional, kebocoran jaringan, maksimal 20 persen. Kebocoran tersebut disebabkan dominan karena usia pipa yang sudah tua yakni lebih dari 30 tahun. Pipa-pipa yang bocor itu sebagian besar berada di Kota Bangli yakni di jalur utama seperti di Jalan Ngurah Rai dan jalan Nusantara. "Kebocoran pipa PDAM memang masih

tinggi dan melebihi standar maksimal nasional. Kebocoran itu memang karena pipa dan karet-karet sambungannya sudah tua," ujar Direktur PDAM Bangli I Wayan Gede Yuliawan Askara, Rabu (29/4) kemarin.

Menurut Askara, kebocoran pipa PDAM ini memang ada yang bisa langsung diketahui dan ada yang sudah lama baru bisa terlihat terutama di pipa yang ditanam dipinggir jalan dengan kedalaman 1,5 meter. "Biasanya pipa yang

ditanam itu jika bocor airnya akan terserap tanah dan setelah lama baru kelihatan," ungkapnya. Perbaikan pipa-pipa yang bocor karena sudah tua itu dilakukan bertahap dengan yang kualitasnya sesuai standar.

Awalnya kebocoran mencapai 36 persen lalu bisa dikurangi menjadi 30 persen dan sekarang tinggal 29 persen. Dengan adanya perbaikan kebocoran itu maka otomatis membuat biaya

operasional jauh lebih tinggi dari pendapatan. Tahun lalu pendapatan mencapai Rp 10 miliar. Sedangkan biaya produksi mencapai angka Rp 11 miliar atau PDAM minus Rp 1 miliar. Agar biaya produksi dengan pemasukan seimbang maka tarif yang saat ini Rp 1.650 perkubik sejak enam tahun lalu perlu disesuaikan menjadi Rp 2.500 perkubik. "Namun sebelum menaikkan tarif kami harus memperbaiki pelayanan dulu. (nom/gup)



Radar Bali

Empat Dosen Undiksha Diperiksa

DENPASAR - Tersangka dugaan kasus korupsi pengadaaan lahan Undiksha hingga kemarin masih dua orang. Namun Tim Jaksa terus melakukan pemeriksaan atas kasus ini. Sebelumnya sudah memeriksa dua profesor, yaitu Prof Wayan Rai dan Prof Ketut Suma. Kemarin ada empat Dosen Undiksha yang diperiksa.

"Tetap ada yang diperiksa, kayaknya empat orang," jelas sumber koran ini. Dia mengatakan semua dari unsur Undiksha.

Siapa? Sumber tersebut mengatakan IB Emaharta, Ketut Suanjaya, Gusti Ngurah Semadi Putra dan Made Arnawa. "Semua orang-orang Undiksha," ungkapny. Mereka diperiksa oleh tim jaksa yang terdiri dari Gede Arthana, Wayan Suardi, Akmal Kodrat dan Subhakan.

Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan informasi ini. Dia mengatakan memang ada empat orang dari Undiksha. "Empat orang dari Undiksha," ujarnya. ketika dirinci empat nama-nama itu, dia membenarkan. "Ya memang itu *dah* nama-namanya, ■

► Baca Empat... Hal 29

IB Made Oka Diberi Kasur Lipat

■ EMPAT

Sambungan dari hal 19

IB Emaharta, Ketut Suanjaya, Gusti Ngurah Semadi Putra dan Made Arnawa," katanya.

Seperti halnya berita sebelumnya, Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan mengumumkan nama tersangka setelah diminta oleh Aspidsus Kejati Bali.

"Pagi-pagi saya dipanggil Pak Aspidsus, akhirnya baru kami diberikan informasi dan akhirnya diminta mengumumkan oleh Pak Aspidsus (Putu Gede Sudharma)," jelas Ashari saat mengumumkan kasus ini ke media pada Selasa (21/4).

Sedangkan IB Made Oka, asisten II Sekkab Karangasem yang terseret khusus korupsi

pipanisasi kemarin masih menjalani mapaneling (masa penganalan lingkungan) selama tujuh hari di Lapas Karangasem. Kemarin dia mendapat kunjungan dari anak dan istrinya. Dalam kunjungan tersebut mantan Kadis PU Karangasem itu dibawakan kasus lipat berwarna merah hati. (art/tra/yes)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 19 dan 29



Gedung 31 Diusut Kejati atau Kejari

Kasi Intel: Kami Tunggu Pak Kajari di Bali

DENPASAR - Urusan kasus korupsi di Pemkab Badung memang "kebal". Ternyata kasus gedung unit 31 yang hilang misterius, benar ditangani Kejati namun diendapkan era Kajati AF Darmawan. Saat ini akan dibahas, apakah Kejati Bali yang menuntaskan atau Kejari Den-

pasar yang akan turun tangan.

Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir mengatakan akan menunggu Kajari Denpasar Imanuel Zebua dari Cilacap lantaran ikut dalam proses eksekusi mati duo Bali Nine. "Kami tunggu dulu pak Kajari, untuk bisa kami nanti konsultasikan kondisi ini. Terkait dengan laporan masyarakat, dengan hilangnya satu gedung dalam pembangunan Puspem Badung," ungkap Syahrir saat dikonfirmasi kemarin.

Dia mengatakan, nanti juga

akan ditanyakan secara jelas. Apakah mempersilakan Kejati Bali yang menuntaskan atau Kejari Denpasar yang akan menindaklanjuti laporan masyarakat ini. "Biar tidak nanti tumpang tindih. Kami konsultasi dulu ke atasan, apakah nanti Kejati yang menuntaskan atau kami di Kejari menindaklanjuti laporan ini," ungkapnya.

Informasi yang sebelumnya dirangkum koran ini, kasus Gedung 31 di Puspem Badung ini memang ditangani oleh Kajati

Bali AF Darmawan. Jaksa intel yang turun disebut-sebut Agung Maga dan Sucitrawan. Namun kasus ini akhirnya tidak jelas juntrungannya. Berbarengan dengan kasus ini, juga ada kasus yang menyita perhatian publik. Yaitu kasus dugaan suap oleh Djoko Candra, dalam membangun Hotel Mulia.

Termasuk ada kejanggalan izin turun pada hari Sabtu oleh Bupati Badung. Sedangkan kasus lain yang juga ditutup era AF Darmawan adalah kasus

dugaan korupsi RS Nyitdah, Tabanan. "Intinya kasus ini diselesaikan oleh Badung era Pak Af Darmawan," ungkap sumber koran ini.

Dikonfirmasikan ke Ashari sebelumnya, membenarkan bahwa kasus ini ditangani Kejati Bali era AF Darmawan sekitar tahun 2009. Namun dia mengelak-jelaskan secara rinci. Namun mengatakan jika memang Kejari menemukan ada penyimpanan, dia mempersilakan untuk memproses. (art/han)

Edisi : Kamis, 30 April 2015

Hal : 22



Rp 3,1 M untuk Gedung Baru Dispenda

SINGARAJA - Dinas Pendapatan Buleleng mulai membangun gedung perkantoran baru, di areal Pelayanan Pajak Daerah. Selama ini pelayanan pajak daerah yang dilakukan Dispenda Buleleng, terpisah dengan pusat pelaksanaan administrasi Dispenda.

Sejak setahun lalu, pelayanan pajak daerah Dispenda Buleleng dilakukan di Jalan Ngurah Rai Singaraja. Sementara untuk pelayanan administrasi perkantoran, dilakukan di Jalan Kartini Singaraja, yang berjarak sekitar tiga kilometer. Pemisahan administrasi itu pun dianggap kurang efektif.

Tahun ini, Dispenda Buleleng memutuskan membangun gedung perkantoran dengan lantai dua, di belakang kantor

Pelayanan Pajak Daerah di Jalan Ngurah Rai Singaraja. Selanjutnya kantor Dispenda Buleleng di Jalan Kartini, akan diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dispenda Buleleng Ida Bagus Puja Erawan mengatakan, penggabungan administrasi perkantoran dengan pelayanan pajak daerah, diharapkan bisa melayani lebih cepat dan lebih efektif. "Terutama kan dari segi surat menyurat. Supaya lebih cepat lagi, tidak terpi kantornya," kata Puja Erawan.

Mantan Kepala Disbudpar Buleleng itu menyatakan, bangunan harus sudah jadi pada tanggal 8 Agustus mendatang.

Sehingga pada bulan September, gedung sudah bisa digunakan secara efektif untuk sarana perkantoran. Sekadar diketahui,

pembangunan gedung Dispenda Buleleng dianggarkan Rp 3,1 miliar dalam APBD Induk 2015. Setelah dilakukan tender, pem-

angunan gedung hanya menghabiskan dana Rp 2,4 miliar. Proyek itu dimenangkan oleh PT. Megatama Karya. (eps/gup)